



Journal of Governance
and Local Politics

ISSN (online) : 2684-9992

JGLP

Journal of Governance and Local Politics

Journal of Governance and Local Politics (JGLP)	Vol. 4	No. 1	Page 001-124	May 2022	ISSN 1684-9992
---	--------	-------	--------------	----------	----------------



JGLP

Journal of Governance and Local Politics

1-11	Konflik Partai Gerindra dan PKS dalam Proses Pengisian Kekosongan Posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta Dinda Mutia Khaerun Nisa, Sri Budi Eko Wardani
12-21	Reproduksi Kuasa: Politik Etnis Tionghoa dalam Kontestasi Pemilihan Legislatif Kota Makassar) Asfar Mutaaly Bareilly, Gustiana A Kambo, Muhammad
22-32	Politik Pencalonan Pasangan Suami-Istri pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Sekaran Kabupaten Bojonegoro dan Desa Lembor Kabupaten Lamongan Anang Fajrul Ukhwaluddin, Valina Singka Subekti
33 – 46	Oposisi Masyarakat Sipil Kontra Hegemoni Negara Melalui Media Sosial Youtube di Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo Ali Ikhwan, Sri Budi Eko Wardani
47 – 54	Kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 di Era New Normal Sadar
56 – 69	The Constraining Dynamics to Promote the Inclusive Village Governance in an Autocratic Leadership Setting Muhammad Taufiq, Rahmad Hidayat
70 – 84	Sinergitas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kodim 0816 Sidoarjo Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19 Dewi Kurniasih, Aulia Zharifah
85 – 102	Collective Action Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam Percepatan Pariwisata Desa Labuan Kertasari untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Ilham Zitri
103 – 117	Mengukur Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat Rifaid, M. Ulfatul Akbar Jafar, M. Taufik Rachman, Johan Natirius
118 – 124	Kolaborasi Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Tradisi Lisan Iko-Iko Suku Bajau Di Sulawesi Tenggara Abdul Hakim

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

[Anirwan](#), Universitas Pancasakti, Indonesia

Managing Editor

[Syaharuddin](#), Universitas Pancasakti, Indonesia

Section Editor

[Zaldi Rusnaedy](#), Universitas Pancasakti, Indonesia

[Dedy Herianto](#), Universitas Pancasakti, Indonesia

[Iqbal Aidar Idrus](#), Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia

[Nur Khaerah](#), Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

[Sumardi](#), Universitas Pancasakti, Indonesia

[Marno Wance](#), Universitas Pattimura, Indonesia

[Rifaid](#), Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram, Indonesia

[Riska Sarofah](#), Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia

[Nur Saleh Hartaman](#), Scopus ID: [57395318100](#), Universitas Muhammadiyah Makassar

Co-Editor

[Almuhajir Haris](#), Universitas Pancasakti, Indonesia

Sinergitas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kodim 0816 Sidoarjo Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19

Dewi Kurniasih¹, Aulia Zharifah²

Universitas Komputer Indonesia, Jalan Dipatiukur No 102-116, Kota Bandung, 40132

Corresponding Author: dewi.kurniasih@email.unikom.ac.id

Keyword:

Synergy;
Local Government;
Covid-19 Pandemic

Abstract: *The aims of this study is to analyze the synergy between the Sidoarjo Regency Government and the 0816 Sidoarjo Kodim in an effort to recover the economy during the Covid-19 pandemic. The research method we use is a qualitative-phenomenological approach. The results of the study show that the synergy between the Sidoarjo Regency Government and the Military Unit in this case the 0816/Sidoarjo Kodim has been running quite optimally. The available resources are sufficient, apart from that, the partnership relationship is also quite good. The characteristics of partners in the synergy of Government Sidoarjo Regency and Kodim 0816/Sidoarjo in an effort to recover the economy during the Covid-19 pandemic in Sidoarjo Regency are quite optimal. The partnership relationship in the Synergy of Government Sidoarjo Regency and Kodim 0816/Sidoarjo in Handling Covid-19 in Sidoarjo Regency is quite good. The characteristics of the partnership in the Synergy of of Government Sidoarjo Regency and Kodim 0816/Sidoarjo in Handling Covid-19 in Sidoarjo Regency are quite good. It seen from the leadership of the chairman of the Task Force for the Acceleration of Covid-19 Response that he was able to provide enlightenment regarding activities. Environmental factors in the synergy between of Government Sidoarjo Regency and Kodim 0816/Sidoarjo in Handling Covid-19 in Sidoarjo Regency are quite conducive. However, what is quite influential is the existence of information that is Hoax and disrupts the level of trust in the Sidoarjo Regency government. Therefore, it is necessary to provide continuous education to the community about COVID-19, socialization so that the community participates in economic recovery efforts, implementation Karya Bakti or Food Security activities, as well as empowering MSME actors to rise again.*

Kata Kunci:

Sinergitas;
Pemerintah Daerah;
Pandemi Covid-19

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergitas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kodim 0816 Sidoarjo dalam upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19. Peneliti menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif fenomenologis. Hasil studi menunjukkan bahwa sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Satuan Militer dalam hal ini Kodim 0816/Sidoarjo sudah berjalan dengan cukup optimal. Sumber daya yang dimiliki sudah cukup memadai, selain itu ke hubungan kemitraan pun cukup baik dilaksanakan. Karakteristik mitra dalam sinergitas Pemerintah Daerah dan Satuan Militer dalam upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19 Di Kabupaten Sidoarjo sudah cukup optimal. Hubungan kemitraan dalam sinergitas Pemerintah Daerah dan Satuan Militer di Kabupaten Sidoarjo sudah cukup baik. Karakteristik kemitraan dalam sinergitas Pemerintah Daerah dan Satuan Militer di Kabupaten Sidoarjo pun sudah cukup baik. Terlihat dari kepemimpinan ketua Gugus Tugas Percepatan Panggulangan Covid-19 mampu memberikan pencerahan terkait kegiatan. Faktor lingkungan dalam sinergitas Pemerintah Daerah dan Satuan Militer dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo cukup kondusif. Akan tetapi, hal yang cukup berpengaruh adalah adanya informasi-informasi yang bersifat Hoax dan mengganggu tingkat kepercayaan kepada pemerintah Kabupaten Sidoarjo maka dari itu perlu adanya pemberian edukasi kepada masyarakat secara terus menerus tentang covid-19, sosialisasi agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam upaya pemulihan ekonomi, pelaksanaan Karya Bakti atau kegiatan Ketahanan Pangan, serta pemberdayaan pelaku UMKM agar bangkit kembali.

PENDAHULUAN

Pandemi Covid 19 berdampak secara global di berbagai sector terutama pada sector ekonomi. Berbagai akibat dari adanya pandemi covid-19 terlihat dari PHK yang dilakukan secara besar-besaran oleh beberapa perusahaan. Selain itu banyaknya penutupan perusahaan yang berdampak pula pada karyawan yang dirumahkan. *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) memberikan laporan bahwa yang terkena dampak yang cukup signifikan adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Virus corona (Covid-19) ditetapkan oleh *World Health Organization* (WHO) menjadi pandemi dikarenakan penyebaran virus ke berbagai berbagai belahan negara. WHO sendiri memberikan arti pandemi sebagai kondisi yang terjadi pada populasi di seluruh dunia yang dapat memiliki potensi menjadikannya jatuh lalu sakit. Penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional, penetapan diikuti dengan Penetapan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Covid-19 melalui Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020. Salah satu upaya yang pertama kali dilakukan oleh Pemerintah melalui himbauan kepada masyarakat untuk berada dirumah dan menerapkan physical distancing guna memutus rantai peredaran Virus Corona, namun karena tidak maksimal dipatuhi sehingga angka positif terus bertambah (Jusriadi et al., 2020).

Salah satu daerah yang terdampak pandemi covid-19 adalah Kabupaten Sidoarjo. Dampak adanya pandemi Covid-19 jelas terasa oleh masyarakat Sidoarjo diantaranya adalah bahan makanan, obat-obatan, Hand Sanitizer mengalami sedikit kelangkaan. Barang langka lainnya adalah masker dan mengalami kenaikan harga, kesediaan bahan pangan masih aman tersedia. Serta, banyaknya pembatalan agenda kegiatan yang sudah terprogram baik dari Instansi TNI, Pemda maupun Ormas atau lembaga-lembaga lainnya yang mengundang masyarakat dan sedikit banyak berdampak pada pengelola usaha Chatring maupun penyewaan gedung.

Pada masa persaingan yang semakin ketat, semua organisasi yang ada dituntut untuk senantiasa mampu melakukan evaluasi pada setiap pekerjaan yang telah dilaksanakan. Selain itu berupaya untuk melakukan berbagai perbaikan, sehingga dapat terus berkembang dan memiliki daya saing. Setiap perbaikan yang dilakukan harus berkesinambungan. Hal tersebut dilaksanakan dengan tujuan agar organisasi tersebut dapat menjadi semakin berkembang. Organisasi dapat bersaing dan diharapkan dapat mempertahankan kualitas kinerja yang sulit untuk dilakukan prediksi. Strategi dalam upaya memaksimalkan serta memperbaiki kinerja dari organisasi adalah dari pemerintahan daerah. Pembentukan daerah dimaksudkan agar pemerintah mampu meningkatkan pelayanan publik sehingga berguna dalam percepatan perwujudan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan daerah berdasarkan pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penanganan pandemi COVID-19 sebagaimana dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiratkan bahwa kondisi krisis akibat pandemi ini masuk ke dalam ranah kebencanaan. Dalam merespons terjadinya pandemic Covid-19, beberapa kebijakan dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia yang diantaranya adalah Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 yang kemudian diralat dengan Keppres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dimana BNPB bekerja sebagai

Pelaksana Gugus Tugas bersama unsur kementerian serta lembaga pemerintah, TNI, POLRI beserta unsur yang lainnya. Walaupun kemudian pada tanggal 20 Juli 2020, kemudian Gugus Tugas ini kemudian dibubarkan dan diganti dengan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Dengan adanya Komite penanganan Covid-19 berharap semua persoalan di bidang ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi dapat diselesaikan beriringan dengan berbagai persoalan kesehatan.

Sinergitas berasal dari kata sinergi. Sinergi merupakan suatu kegiatan yang berupa operasi gabungan. Covey (1993) sendiri mengartikan sinergi sebagai suatu kombinasi atau keterpaduan dari berbagai bidang maupun dimana mampu menghasilkan luaran yang lebih baik. Sinergi juga berfungsi sebagai katalisator. Selain itu dapat pula menjadi penyatuan serta pelepasan kekuatan terbesar dalam diri manusia. Pembahasan tersebut merupakan upaya untuk menyiapkan serta menciptakan sinergi yang optimal dalam sebuah kehidupan. Tingkat kerjasama yang paling baik yaitu sinergitas yang berarti suatu kerjasama yang memiliki tingkat tinggi. Selain itu adanya sikap saling mempercayai serta adanya keterpaduan sehingga mampu memberikan hasil luaran yang lebih besar didasarkan pada penjumlahan hasil luaran dari pihak masing-masing yang bekerja sama. Komponen yang akan mempermudah proses sinergitas mampu berpikir sinergi, saling menghargai serta terjadi kesamaan secara pandang (Najiyati & Susilo, 2011).

Sinergi sendiri dapat terselenggara dengan mengacu kepada *Resources, Partner characteristics, Relationships among partners, Partnership characteristics, External environment*. Pada resources / Sumber daya, indikatornya terdiri dari keuangan, peralatan, barang, Keterampilan dan keahlian, Informasi, Hubungan dengan orang, organisasi maupun kelompok. Pada dimensi *Partner characteristics* terdiri dari heterogenitas serta tingkat keterlibatan maupun partisipasi. Dimensi *Relationships among partners* terdiri dari Kepercayaan, Rasa Hormat, Konflik dan Kekuasaan. Dimensi *Partnership characteristics* terdiri dari Kepemimpinan, Administrasi dan Manajemen, Tata Kelola, dan Efisiensi. Sedangkan dimensi *External environment* (lingkungan luar) terdiri dari Karakteristik masyarakat dan Kebijakan publik maupun organisasi. Hambatan dalam penanggulangan bencana dapat diminimalisir oleh adanya sinergitas antar berbagai pihak terkait. Demikian halnya dalam upaya pemulihan ekonomi sebagai akibat bencana yang diakibatkan merebaknya virus Covid-19. Diperlukan adanya sinergitas antara pemerintah terkait yaitu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Satuan Komando Kewilayahan di Kabupaten Sidoarjo. Di tengah arus globalisasi yang demikian besar dan sebagai negara demokrasi, peranan sipil dan militer sama pentingnya dalam mewujudkan SDM (Susdarwono, 2020).

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan berbagai upaya dalam menjalankan proses sinergitas, penyempurnaan serta penyelarasan dari sasaran serta tujuan dari visi misi Kabupaten Sidoarjo yang sejahtera, maju, berkarakter, dan berkelanjutan dalam menghadapi pandemic Covid-19. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan sebagai upaya penanganan serta peningkatan sistem kesehatan dan penanggulangan dari dampak ekonomi. Implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu adanya keterpaduan serta penyelarasan sehingga pada tahap pencapaian tujuan dapat terealisasi sesuai kemampuan serta kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah.

Dalam rangka menjamin kondisi sosial dan ekonomi yang kondusif, perlu dilakukan penyelarasan kebijakan oleh pemerintah daerah. Hal tersebut memerlukan peran dari berbagai pihak seperti satuan komando kewilayahan (Satkowil) TNI AD di

daerah. Pihak dari Satkowil TNI AD disini yaitu Kodam, Kodim dan Koramil. Satkowil menyelenggarakan Pembinaan Teritorial yang dilaksanakan. Pembinaan teritorial dilaksanakan secara terus menerus secara mandiri maupun bersama-sama dengan instansi terkait serta komponen masyarakat lainnya. Pelaksanaan pembinaan teritorial oleh Satkowil memiliki kekuatan hukum secara legal formal. Pembinaan teritorial dilaksanakan tidak terlepas dari koordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Pemerintah daerah bertindak sebagai pembina wilayah dalam rangka terwujudnya ketahanan wilayah. Pelaksanaan tugas yang memiliki nilai yang strategis memerlukan suatu konsepsi dasar dalam penyelenggaraan Binter TNI AD. TNI yang bertugas sebagai bagian dari komponen bangsa bertugas membantu pemerintah dalam menanggulangi berbagai bencana yang kerap dialami oleh Indonesia. Pelaksanaan tugas perbantuan oleh TNI berlandaskan pada jati diri TNI yang merupakan tentara rakyat dimana TNI berasal dari rakyat serta melakukan perjuangan demi rakyat (Kodar et al., 2020).

Kodim 0816/Sidoarjo yang merupakan satkowil yang berada di Kabupaten Sidoarjo yang ikut membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo bersama komponen bangsa memulihkan kondisi ekonomi dimasa Pandemi Covid-19. Kodim 0816/Sidoarjo sendiri merupakan satuan pelaksana berada dibawah Kodam V/Brawijaya yang melibatkan diri dalam rangka Operasi Militer untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Dalam UU tersebut dinyatakan TNI melaksanakan tugas perbantuan terhadap pemerintah daerah serta tugas perbantuan kepada POLRI. Kodim 0816/Sidoarjo terlibat dalam OMSP pada operasi berjangka waktu yang lumayan panjang. Hal tersebut berharap mampu memberikan berbagai macam bantuan secara optimal. Selain itu akan terbentuk pula sinergitas dengan Pemda dalam upayanya memulihkan kondisi ekonomi pada masa pandemic Covid-19.

Beberapa permasalahan yang menjadi penyebab penanganan covid-19 kurang cepat tanggap diantaranya adalah kurangnya rasa dari masing-masing orang seperti (*sense of crisis*). Hal tersebut tentu saja mampu mengancam keterlambatan dalam membuat keputusan. Permasalahan lainnya adalah lemahnya koordinasi yang terjadi antar-stakeholder, terutama koordinasi antara pemerintah pusat serta pemerintah daerah. Koordinasi yang tidak sinkron tersebut yang menjadi akibat pengendalian virus yang terkatung-katung. Permasalahan selanjutnya adalah masyarakat yang tampak acuh dan tidak patuh terhadap himbuan yang disampaikan oleh pemerintah. Permasalahan tersebut berdampak pada tersendatnya penanganan pandemi. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya dukungan dari masyarakat. Ketiga faktor tersebut membuat rumit segala upaya yang diterapkan oleh pemerintah dalam rangka pengendalian penyebaran COVID-19 yang terjadi di Indonesia (Agustino, 2020). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sinergitas yang terjadi antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kodim 0816/ Sidoarjo dalam penanganan ekonomi di masa pandemi Covid-19. Penyelenggaraan sinergitas antara pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan satuan militer dalam hal ini Kodim 0816 Sidoarjo belum optimal. Peran yang dijalankan oleh satuan militer di Kabupaten Sidoarjo dalam membantu pemerintah daerah belum selaras dengan kebijakan pemerintah sehingga terjadi tumpang tindih kebijakan. Uraian di atas membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan sinergitas pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan kodim 0816 dalam upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi covid-19.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersinergi dengan Satuan Militer (Kodim 0816/Sidoarjo). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat fenomenologis. Pendekatan kualitatif yang diambil oleh peneliti diharapkan mampu memberikan gambaran faktual serta pemahaman tentang objek yang diteliti secara mendalam apa adanya tanpa adanya intervensi apapun dari peneliti.

Dalam pendekatan kualitatif, angka-angka tidak akan dianalisis oleh peneliti akan tetapi berupa kata-kata dimana dinyatakan sebagai alasan maupun interpretasi atau berupa makna serta beragam kejadian juga perbuatan dimana dilakukan oleh seseorang maupun oleh kelompok sosial. Sumber data pada metode penelitian ini dibedakan menjadi data primer maupun data sekunder. Pemahaman dari data primer yaitu sumber data yang diperolehnya berasal dari sumber aslinya. Data primer diperoleh melalui metode survei dan observasi. Data sekunder perolehan datanya melalui sumber data secara tidak langsung yaitu dengan media perantara.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan secara langsung keadaan instansi maupun lembaga yang berhubungan dengan kegiatan yang diteliti. Observasi dilakukan penulis terhadap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Kodim 0816/Sidoarjo dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo. Peneliti berkeinginan untuk mengetahui kebenaran dari pandangan teoritis mengenai permasalahan yang diteliti dengan kenyataan yang ada. Proses wawancara dilakukan dengan informan untuk mendapatkan data yang lebih mendalam. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Kodim 0816/Sidoarjo dalam upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo. Bungin menjelaskan bahwa studi dokumentasi menjadi salah satu metode yang penggunaannya untuk menelusuri berbagai data yang sifatnya historis. Solusi Agar Penelitian Kualitatif Sederhana Tetap Dapat disusun tanpa harus melakukan pembahasan yang bertele-tele tetapi tetap dapat dipertanggungjawabkan, maka kami melakukan modifikasi model dari desain sederhana dengan model desain sederhana dengan triangulasi teori (Rofiah & Bungin, 2020). Studi dokumentasi dilakukan untuk mendapat data-data yang terkait sinergitas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kodim 0816 dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo.

Teknik analisis data dilakukan dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan penelitian yang dilakukan dengan memberikan gambaran kejadian ataupun peristiwa yang menjadi pusat perhatian melalui data yang telah dikumpulkan guna mencapai tujuan penelitian. Selain itu, dilakukan pengujian terhadap keabsahan data yang diperoleh, terutama pada data primer hasil wawancara dan observasi. Uji keabsahan data yang dilakukan adalah melalui validasi data dan realibilitas.

Pada penelitian ini, informan dan narasumber dipilih berdasarkan keterlibatannya secara langsung dengan judul penelitian ini. Daftar informan dan narasumber untuk stakeholders pada KKL Wilhan ini adalah Kodim 0816/Sidoarjo, Polresta Sidoarjo, dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

HASIL DAN DISKUSI

Penduduk menjadi faktor penting di dalam pembangunan pemerintahan. Kabupaten Sidoarjo memiliki jumlah penduduk pada tahun 2019 mencapai 2.262.440 dimana komposisi jumlah penduduk laki-laki 1.140.627 jiwa dan jumlah penduduk perempuan berjumlah 1.121.813 jiwa. Jumlah penduduk per kecamatan di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada table 1 di bawah ini:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kabupaten Sidoarjo Per Kecamatan

NO	KECAMATAN	LAKI – LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1.	TARIK	36,240	35,761	72,001
2.	PRAMBON	43,012	42,017	85,029
3.	KREMBUNG	37,941	37,702	75,643
4.	PORONG	43,177	42,537	85,714
5.	JABON	30,643	30,408	61,051
6.	TANGGULANGIN	53,798	52,796	106,594
7.	CANDI	84,697	83,687	168,384
8.	SIDOARJO	113,849	114,427	228,276
9.	TULANGAN	53,987	53,343	107,330
10.	WONOAYU	45,582	44,914	90,496
11.	KRIAN	70,978	68,872	139,850
12.	BALONGBENDO	40,571	39,553	80,124
13.	TAMAN	119,159	115,795	234,954
14.	SUKODONO	67,363	64,920	132,283
15.	BUDURAN	54,631	53,475	108,106
16.	GEDANGAN	68,139	66,428	134,567
17.	SEDATI	56,581	54,931	111,512
18.	WARU	120,279	120,247	240,526
JUMLAH		1,140,627	1,121,813	2,262,440

Sumber : Sidoarjo dalam Angka, BPS, 2020.

Kecamatan yang paling padat penduduknya di Kabupaten Sidoarjo dilihat dari tabel di atas yaitu Kecamatan Waru sebanyak 240.526 jiwa disusul dengan Kecamatan Taman sejumlah 234.954 jiwa. Sedangkan Kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya yaitu Kecamatan Jabon yaitu sebanyak 61.051 jiwa. Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Sidoarjo akibat dari pandemi Covid-19 mengalami peningkatan kemiskinan mencapai 5,63 %. Kabupaten Sidoarjo memiliki posisi geografis yang sangat strategis. Hal tersebut membuat Kabupaten Sidoarjo menjadi sangat potensial secara ekonomi.

Gambaran Umum Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Sidoarjo

Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Sidoarjo menjadi Kabupaten kedua tertinggi dengan kasus Covid-19 di Provinsi Jawa Timur. Penambahan kasus positif Covid-19 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021 sebanyak 10.575 orang, sembuh sebanyak 9932 orang, meninggal 604 orang dan suspect sebanyak 5972 orang. Peta sebaran terlihat dari gambar berikut:



Gambar 2. Peta Sebaran Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan data di atas, Kecamatan yang penambahan jumlah terkonfirmasi positif Covid-19nya terbanyak yaitu Kecamatan Taman sebanyak 7 orang.

Pemerintah pusat telah menetapkan kebijakan-kebijakan sebagai upaya memberi perlindungan kepada masyarakat yang memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah terutama bagi golongan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terdampak COVID-19. Sebanyak 159 negara melaksanakan perencanaan, dan memperkenalkan adaptasi dari 752 jenis perlindungan sosial sebagai salah satu upaya dalam menanggulangi dampak negatif dari adanya pandemi COVID-19. Disejumlah negara telah membuat kebijakan dalam upaya perlindungan sosial yang diakibatkan adanya pandemi. Dalam upaya menjangkau Pengaman Sosial bagi yang terdampak Covid-19, pemerintah telah menyiapkan anggaran 110 Triliun rupiah, yang terdiri dari: Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Kartu Prakerja, Subsidi listrik, insentif perumahan, Sembako Jabodetabek, Bansos Tunai Non-Jabodetabek, dan Program Jaring Pengaman Sosial lainnya.

Permasalahan-permasalahan keamanan saat ini menjadi begitu kompleks dan rumit. Aspek ancaman lebih kompleks dengan dinamika kerawanan yang wujudnya lebih sulit untuk diprediksi. Permasalahan yang berkaitan dengan ancaman nonmiliter justru lebih efektif menjadi tanggung jawab utama pihak daerah karena pada dasarnya isu-isu nonmiliter yang sangat menitikberatkan pada aspek-aspek individu ini hadir di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya sebuah sinergitas antara pemerintah pusat sebagai aktor yang melakukan sekuritisasi dan juga pihak yang mengeluarkan tindak tutur terkait ancaman nonmiliter dan keamanan nontradisional dengan pemerintah daerah yang secara langsung berada di garis depan pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter tersebut (Alfajri et al., 2019). Pelaksanaan kebijakan penanganan Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo memerlukan sinergitas dari berbagai pihak dan salah satunya dengan satuan militer di Kabupaten Sidoarjo yaitu Kodim 0816/Sidarjo. Kebijakan Penjelasan mengenai sinergitas pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan satuan militer sebagai berikut:

Sumber Daya dalam Sinergitas Pemerintah Daerah dan Satuan Militer Dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo

Penyelenggaraan sinergitas dalam upaya pemulihan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo dilihat dari sumber daya yang dimiliki. Sumber daya disini terdiri dari keuangan, peralatan/Sarana prasarana, Informasi, pengesahan dan himpunan kekuatan. Adanya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dijadikan landasan dalam melaksanakan

kebijakan *refocusing* maupun realokasi terhadap anggaran dari pemerintah. Satuan Tugas (Satgas) yang menangani dampak Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo sudah menyiapkan anggaran sebesar 30 milyar sebagai upaya menangani tersebarnya Virus Covid-19 di wilayah Sidoarjo. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kembali melakukan *refocusing* anggaran untuk dalam membiayai penanganan terdampak covid-19. Jumlahnya ada sekitar Rp93 Miliar yang akan di *refocusing* dari Dana Alokasi Umum (DAU). Ainur Rahman selaku Asisten I Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Sidoarjo menjelaskan bahwa telah didiskusikan dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Anggaran yang ditetapkan digunakan untuk insentif tenaga kesehatan, kebutuhan penunjang program vaksinasi, hingga alokasi dana untuk mendukung kelurahan.

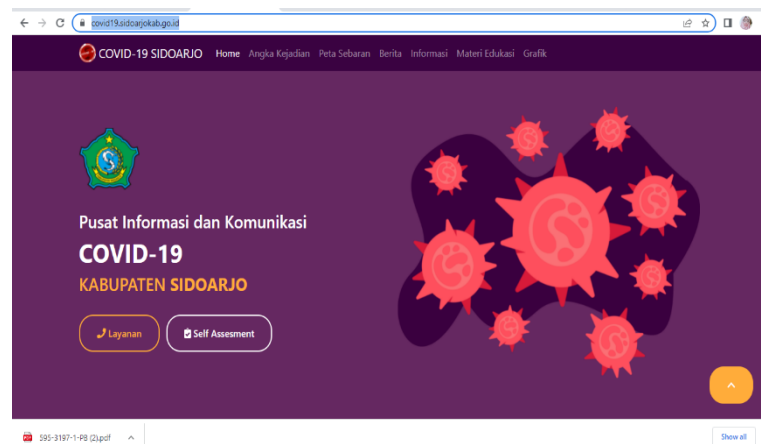
Kodim 0816/ Sidoarjo sendiri tidak menyiapkan anggaran secara khusus dalam membantu pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam upaya memulihkan kondisi ekonomi pada masa pandemi Covid-19. Kebutuhan anggaran untuk meningkatkan penanganan covid-19 masih belum terpenuhi. Padahal anggaran tersebut untuk pengerahan personel TNI selama kurang lebih 150 hari sampai dengan biaya yang diperlukan dalam operasi kontingensi serta proses rehabilitasi. Selain itu anggaran diperlukan untuk kebutuhan alat kesehatan rumah sakit TNI. Factor penentu sinergitas adalah sarana dan prasarana pendukung dalam menangani pandemi Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo. Upaya pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mempercepat penanganan Covid-19 adalah melalui penambahan jumlah sarana prasarana. Sarana dan prasarana pendukung diantaranya adalah memfasilitasi RS rujukan seperti penyediaan alat kesehatan (alkes) dan Alat Pelindung Diri (APD) hingga pengadaan ruang isolasi.

Pelaksanaan proses sinergitas yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan satuan militer daerah dalam hal ini Kodim 0816 adalah adanya informasi. Informasi yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus memiliki kejelasan informasi agar tidak terjadi miskomunikasi. Kejelasan dari informasi yang diberikan menjadi satu ukuran tentang bagaimana proses penyelenggaraan pemberian layanan kepada masyarakat di masa pandemi. Pelayanan umum terutama dalam upaya penanganan Covid-19 harus selalu diinformasikan oleh pemerintah secara terbuka. Selain itu informasi yang diberikan dapat diakses banyak pihak dimana membutuhkannya. Saat ini informasi mengenai Covid-19 sangat dicari oleh masyarakat sehingga mampu memahami berita-berita yang diberikan dan tidak menjadi korban hoax.

Peran Komunikasi dalam suatu organisasi sangatlah penting. Hal tersebut dikarena proses komunikasi akan selalu dilakukan dalam keseharian pelaksanaan tugasnya. Informasi yang disampaikan cukup jelas. Selain itu, informasi yang diberikan dapat dimengerti serta dipahami satuan gugus tugas percepatan penanganan kondisi ekonomi saat pandemi Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo diberikan kepada seluruh masyarakat. Penyampaian informasi mengenai tugas satuan gugus tugas tersebut itu sendiri dilakukan dengan penyampaian informasi kepada semua pihak baik mitra pemerintah maupun masyarakat. Tindak lanjut dari penyebaran informasi tersebut, setiap kepala bidang yang terkait dengan penanganan pandemic Covid-19 menginformasikannya kembali kepada seluruh stafnya. Setiap bentuk penyampaian informasi bahwa satuan gugus tugas merupakan upaya pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam memastikan upaya pemulihan ekonomi pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo dapat berjalan baik sesuai dengan perencanaan sebelumnya.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membuat portal informasi mengenai Virus Corona (Covid-19). Setiap warga Kabupaten Sidoarjo dapat mengunjungi

<https://covid19.sidoarjokab.go.id/> yang peruntukkannya untuk mengetahui perkembangan kasus Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo. Berikut gambar portal informasi Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo:



Gambar 3. Portal Covid-19 di Sidoarjo

Portal tersebut di atas, didalamnya terdapat penyediaan segala bentuk informasi yang bersifat edukatif dalam menginformasikan tentang penyakit baru di dunia itu. Akan tetapi, masyarakat diharapkan tidak fokus hanya pada angka yang tertera dalam portal, tetapi juga masyarakat dapat melihat anjuran yang diberikan oleh pemerintah dalam menjaga hidup yang sehat dan bersih serta yang terpenting adalah pentingnya cuci tangan, menjaga jarak, dan sebagainya. Selain itu, Portal tersebut menampilkan perkembangan kasus terkini khusus di Kabupaten Sidoarjo.

Dalam menangani pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19 bersama komponen bangsa terdapat beberapa hambatan di bidang personil/SDM yang dihadapi Kodim diantaranya adalah terbatasnya personel Babinsa Kodim 0816 Sidoarjo serta Usia Babinsa yang sudah diatas 50 tahun sehingga apabila babinsa tersebut terlalu lemah fisik maka rawan terhadap penyebaran Covid-19. Selain itu Belum adanya dukungan anggaran baik dari pemerintah maupun TNI AD terhadap program pemulihan ekonomi. Kurang dukungan sepeda motor babinsa yang ada diwilayah sehingga personel masih menggunakan sepeda motor pribadi sebagai saran transportasi. Belum adanya bujuk atau juklap tentang keterlibatan TNI dalam pemulihan ekonomi.

Karakteristik Mitra dalam Sinergitas Pemerintah Daerah Dan Satuan Militer Dalam Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Sidoarjo

Penanganan pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19 memerlukan berbagai upaya terutama dalam promosi kesehatan dimana menyasar kepada setiap individu, komunitas maupun organisasi. Dalam hal pembuatan kebijakan, diharapkan masyarakat dapat menjaga kesehatannya dengan menerapkan 5M serta orang-orang disekitarnya dapat menjaga dirinya melalui ketersediaan dukungan dari sarana serta prasarana yang diperlukan. Adanya pemberlakuan PPKM ternyata terbukti ampuh dalam mncegah penyebaran Covid-19. Selain itu adanya seruan untuk dilakukannya Vaksinasi oleh pemerintah menyebabkan melandainya peningkatan kasus Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo. Akan tetapi, ketika masa libur panjang dan banyaknya orang-orang yang keluar rumah, peningkatan kasus positif Covid-19 pun terjadi. Pemberlakuan PPKM menjadi salah satu upaya dalam rangka memperkuat penegakan hukum.

Tidak hanya pemerintah Kabupaten Sidoarjo, bahkan satuan militer Kodim 0816/BS ikut mendorong kepatuhan terhadap protokol kesehatan melalui posko yang

disediakan. Dalam upaya mendorong penciptaan inovasi serta kreativitas yang berbasis pada kearifan loka perlu dilaksanakan penguatan modal sosial serta budaya. Disusunnya pedoman perubahan perilaku sebagai upaya mendorong perubahan perilaku di masyarakat yaitu konsisten menjalankan 5M di setiap wilayah dimana disesuaikan dengan kondisi wilayah tersebut.

Secara aktif TNI dalam hal ini Satkowil dilibatkan secara aktif berpartisipasi dalam upaya pemulihan ekonomi di masa Pandemi di wilayahnya. Pengerahan Satkowil TNI AD dalam tugas selain perang (OMSP) pada dasarnya menjadi sebuah praktik yang banyak dilakukan belakangan ini. Satkowil termasuk Kodim 0816/Sidoarjo sejak awal dilibatkan dalam upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19. Setiap kontribusi dari anggota TNI tentu saja tidak dapat dikesampingkan namun layak untuk diapresiasi. Pelibatan TNI telah diatur pada skema Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam Undang-Undang No.34/2004 tentang TNI. Undang-Undang TNI tersebut mengamatkan mengenai pengerahan militer dalam OMSP baru bisa dilaksanakan apabila terdapat keputusan politik negara.

Keputusan politik negara sebagaimana dimaksud di atas merupakan suatu kebijakan politik dari pemerintah yang secara bersama dengan DPR dilakukan perumusan melalui mekanisme dari hubungan kerja antara pemerintah daerah dan DPRD. Pemerintah daerah telah banyak menerbitkan keputusan politik negara mengenai pelibatan TNI dalam penanganan Covid-19. Pemerintah menerbitkan peraturan mengenai pembentukan gugus tugas dalam Keppres No.7/2020 pada bulan Maret yang kemudian direvisi dalam Keppres No.9/2020 pada bulan April dan Inpres No. 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Peraturan yang telah ditetapkan tersebut memang menyebutkan bahwa TNI menjadi salah satu unsur pelaksana serta mandat yang telah diembankan kepadanya.

Peran Preventif Kodim 0816/Sidoarjo dalam upaya pemulihan ekonomi pada saat pandemi Covid-19 bersama dengan mitra lainnya ikut membantu pemerintah daerah. Kodim 0816/Sidoarjo telah melaksanakan tugas perbantuan dalam membantu pemerintah Kabupaten Sidoarjo memulihkan ekonomi di masa pandemi Covid-19, tugas tersebut diantaranya adalah pelaksanaan Gabungan Ops Yustisi, pelaksanaan Gabungan Gaktiblin, serta pelaksanaan Ops Gabungan patroli terutama di tempat keramaian. Tugas tersebut menjadi salah satu upaya Kodim 0816/Sidoarjo dalam mendukung dan mengawal kebijakan pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi.

Beberapa kegiatan yang telah dijalankan oleh Kodim 0816/Sidoarjo dalam membantu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yaitu melakukan perbantuan pelaksanaan Ops Jam Malam. Selain itu, dilakukan dalam membantu Kepolisian terkait pemantauan setiap aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat terutama dalam perjalanan keluar kota. Kodim 0816 membantu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menghimbau masyarakat untuk tetap patuh pada protokol kesehatan. Tugas perbantuan yang dilakukan untuk membantu pemerintah daerah mendata program vaksinasi yang telah dijalankan bagi seluruh masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Kodim 0816 telah memberikan penyuluhan dalam rangka membantu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai upaya pemulihan ekonomi rakyat. Kodim 0816 telah melakukan tugas non program terlebih dalam pemberian penyuluhan terutama dalam memberikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat sebagai wujud kerjasama antara Kodim 0816/ Sidoarjo dengan Dinas Kesehatan Kab. Sidoarjo. Dilaksanakannya penyuluhan oleh satuan tugas tentu saja memberikan kedarasan bagi semua komponen

masyarakat yang kurang pemahaman mengenai penyebaran COVID-19 kepada masyarakat.

Kodim 0816/Sidoarjo telah melaksanakan proses komunikasi serta melaksanakan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Sidoarjo terkait proses penanganan pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 24 Februari 2021 di Pendopo Kab. Sidoarjo bersinergi dengan Forkopimda dan SKPD terkait Pemkab Sidoarjo.

Kodim 0816 Sidoarjo telah melakukan proses komunikasi dengan beberapa instansi. Beberapa instansi yang terlibat diantaranya adalah pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Polres Sidoarjo, Dinas Kesehatan Sidoarjo, dan Dinas Kejaksaan Negeri Kab. Sidoarjo. Kodim 0816 juga telah melakukan beberapa kegiatan antara lain: Patroli jam malam kepada Toko, Swalayan dan tempat kuliner/warkop agar mematuhi jam buka dan tutup, Melakukan Operasi Yustisi Gabungan Pemda, Kodim 0816 dan Polres Sidoarjo. Serta memberikan kartu tilang kepada komponen masyarakat yang telah melanggar protokol kesehatan.

Pemerintah berniat baik dalam menjaga pemda juga mendukung bantuan UMKM terhadap masyarakat yang berdampak Pandemi COVID-19. Pengembangan UMKM saat ini belum optimal bagi peningkatan usaha para UMKM. Perkembangan ekonomi saat ini apalagi di masa pandemi COVID-19 berakibat pada penurunan daya saing terutama UMKM sehingga tertinggal oleh negara tetangga seperti Malaysia maupun Tiongkok. Penurunan (Kurniasih, 2021). Dengan terwujudnya sinergitas antar lembaga maka terwujudlah iklim usaha yang kondusif dan menjanjikan bagi pelaku UMKM, kedepannya pemerintah daerah bisa turut serta berpartisipasi melalui perumusan kebijakan yang mendukung pelaku UMKM dan BUMDes misalnya. Selain kebijakan, pemerintah juga harus bisa membantu BUMDes dalam memediasi antara UMKM dan penyedia modal, sehingga kebutuhan permodalan UMKM bisa terpenuhi (Nugroho, 2018). Beberapa kegiatan yang telah dilakukan Kodim 0816/Sidoarjo dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi yaitu dengan program bantuan pemerintah untuk mengasai BLT, BLTTD, Bansos lainnya serta mensinergikan Program Kodim dengan penguatan Kampung Tangguh.

Hubungan Mitra dalam Sinergitas Pemerintah Daerah dan Satuan Militer Dalam Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo

Satuan tugas dalam Penanganan pemulihan ekonomi di masa Pandemi COVID-19 menjadi salah satu lembaga ad-hoc dimana didalamnya berisi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepolisian dan TNI yang disesuaikan berdasarkan fungsi dan tugasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ. Dalam Surat Edaran tersebut khususnya pada poin ketiga dijelaskan, bahwa Satgas COVID-19 di daerah memiliki tugas antara lain: pertama, implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di daerah dilaksanakan dan dikendalikan dengan optimal. Kedua, penyelesaian setiap masalah dalam melaksanakan kebijakan strategis yang mana berkaitan dengan penanganan COVID-19 di daerah. Ketiga, melakukan pengawasan dalam melaksanakan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di daerah. Keempat, menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di daerah. Kelima, komando dan kendali penanganan COVID-19 berada di bawah Kasatgas penanganan COVID-19 Nasional/Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kodim 0816 dalam proses sinergitas dengan Kabupaten Sidoarjo yaitu dengan memberikan pembinaan kepada masyarakat. Pembinaan yang dilakukan melalui langkah Persuasi pembatasan kerumunan, Perkuat soliditas warga, Pengendalian aktivitas social. Babinsa memberikan sosialisasi dan meyakinkan masyarakat bahwa vaksinasi covid 19 aman diberikan kepada seluruh masyarakat dan mengeliminir hoax yang berkembang.



Gambar 4. Sosialisasi Covid-19 oleh Babinsa

Komunikasi dan koordinasi dengan instansi/forkopimda harus selalu dilakukan dalam rangka pemulihan ekonomi agar menjadi satu tujuan, dan ini sudah dilakukan Kodim Kabupaten Sidoarjo dengan baik. Dalam masa percepatan penanganan Covid-19 ini berharap kodim selalu membantu mengawasi dengan melibatkan semua personelnya dari tingkat atas Dandim sampai bawah para babinsanya. Kodim 0816 sudah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dengan dibantu sinergitas bersama aparat yang terkait termasuk pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Penyuluhan dilakukan kepada warga yang kurang mengerti tentang bahaya Covid-19. Dengan memberikan informasi yang valid dan membuka tanya jawab kepada warga yang kurang mengerti tentang bahaya Covid-19.

Karakteristik Kemitraan dalam Sinergitas Pemerintah Daerah dan Satuan Militer Dalam Pemulihan Ekonomi di masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo

Karakteristik kemitraan tidak dapat lepas pada peran kepemimpinan dari seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang strategis sebaiknya mempunyai kemampuan intelektual yang tinggi, sikap emosional, serta keterampilan yang dimilikinya sehingga mampu menjadikannya seorang pemimpin mempunyai nilai tambah. Pemimpin sendiri secara intelektual seharusnya mempunyai kemampuan dalam menganalisis setiap masalah yang ada serta mencoba untuk mencari pemecahan setiap permasalahan yang tepat. Dilihat dari sisi emosionalnya, seorang pemimpin diharuskan mempunyai sikap emosional yang tangguh, memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi serta percaya kepada orang lain, Sementara dilihat pada segi keterampilan, pemimpin diharuskan untuk mempunyai keterampilan untuk berbicara aktif dihadapan umum.

Seorang pemimpin yang baik mampu mewujudkan tujuan organisasi dengan memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik pula kepada bawahannya maupun kepada masyarakat luas. Pemimpin dapat menjadi *agent of change* dimana mampu menciptakan perubahan yang optimal dalam organisasi yang dipimpinnya. Seorang

pemimpin diharapkan mampu menciptakan sebuah inovasi baru terutama dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

Komandan satuan tugas penanganan Covid-19 mampu menciptakan pengembangan profesionalisme dari prajurit bawahannya. Seorang anggota tentara yang memiliki profesionalisme yang tinggi akan memberikan segala macam upaya serta daya dan pikirannya dalam menjalankan tugas yang diembannya disesuaikan dengan perannya yang telah ditentukan, serta sangat senang dengan profesi yang dimilikinya. Kepemimpinan strategis yang memiliki kemampuan intelektual merupakan perilaku pemimpin dalam menciptakan lingkungan yang kondusif dalam membantu meningkatkan keinginan kepada setiap bawahan agar dapat menjalankan semua pekerjaannya dengan sebaik mungkin. Selain itu dilakukan pula kerjasama dengan masyarakat serta mengembangkan setiap skillnya maupun keinginannya masing-masing. Kepemimpinan disini, baik Bupati Sidoarjo maupun komandan Kodim 0816/Kabupaten Sidoarjo mengusahakan agar setiap tugas dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan sebelumnya yang telah ditetapkan serta tujuan yang dikehendaki. Sinergitas antara satuan militer dengan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana alam sangat diperlukan, ditingkatkan, dan dipelihara, baik sebelum bencana, saat bencana, maupun setelah bencana. Kodim tentunya memiliki sumber daya manusia berupa personel yang mumpuni, terlatih, terdidik, dan kompeten dalam urusan penanganan bencana alam, namun tidak memiliki anggaran dan sarana prasarana yang besar untuk mendukung penanggulangan bencana alam (Kodar et al., 2020). Penanganan masalah yang terjadi terutama yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19 memang memerlukan prioritas kepentingan dari Komandan satuan. Selama masa kepemimpinan baik Walikota maupun Komandan satuan Kodim 0816/Sidoarjo yang sekarang, masyarakat menganggap bahwa komandan satgas saat ini telah melakukan prioritas kepentingan. Dimana kepentingan tersebut adalah meminimalisir dampak dari Covid-19 dan pengaman wilayah dari mobilisasi penduduk pasca pandemic Covid-19 yang sewaktu-waktu dapat membuat kenaikan kasus Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo. Akan tetapi pelaksanaan tugas dari satgas masih terkendala dengan adanya sarana dan prasarana pendukung yang kurang. Sehingga memerlukan optimalisasi tugas dan dukungan baik dari pimpinan TNI maupun pemerintah pusat.

Lingkungan Eksternal dalam Sinergitas Pemerintah Daerah dan Satuan Militer Dalam Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo

Lingkungan eksternal dalam proses sinergitas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kodim 0816 Sidoarjo terdiri dari karakteristik dari komunitas dan kebijakan public dan organisasinya. Beberapa organisasi yang menjadi berada pada satuan tugas percepatan pemulihan ekonomi akibat Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo yaitu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari Bupati Sidoarjo sebagai ketua gugus tugas dan Komandan Kodim 0816 sebagai wakil ketua I.

Beberapa strategi pemulihan ekonomi di wilayah Jawa Timur yaitu: meningkatkan realisasi investasi strategis, meningkatkan pertumbuhan sektor riil berbasis produk unggulan local, mendorong penetrasi pada pasar negara non-tradisional, meningkatkan potensi proyek padat karya, subsidi bunga kredit perbankan, memberi subsidi transportasi bahan pangan strategis, dan fasilitasi pemasaran hasil pertanian.

Selain strategi di atas, dilakukan pula optimalisasi pasar online pada masa pandemi. Pasar online disini memanfaatkan *e-commerce* yang berarti pedagang elektronik. E-Commerce sendiri berurusan dengan barang dan jasa melalui media elektronik serta internet (Fibriyanti & Kurniasih, 2019). Dalam pelaksanaan strategi di

atas, terdapat beberapa hal yang membuat percepatan pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19 menjadi terhambat. Faktor eksternal yang menghambat yaitu banyaknya masyarakat yang belum menyadari akan pentingnya protokol kesehatan sehingga penyebaran Covid-19 semakin banyak menyebar di wilayah. Selain itu, belum adanya payung hukum yang kuat tentang keterlibatan TNI dalam melakukan upaya kerjasama dengan pihak instansi terkait. Hambatan lainnya adalah adanya zona Covid 19 mulai dari Zona Orange dan Merah sehingga tidak leluasa dalam melakukan sosialisasi.

Faktor eksternal dari masyarakat yang dapat menghambat pemulihan ekonomi pada masa pandemik adalah banyaknya sosial media yang tidak memiliki kredibilitas baik memberikan berita Hoax terkait Covid-19. Berkaitan dengan tema yang diangkat di atas, dalam konteks ini tantangan dari sebuah kota besar adalah stabilitas ketertiban di masyarakatnya, mengingat salah satu tantangan besar yang berpotensi terjadi di kota-kota besar adalah penyebaran Hoax dan Black Campaign (Susanto & Iqbal, 2019). Terlihat banyaknya bentuk propaganda yang beredar pada media internet dimana berita tersebut menjadi salah satu penyebab keresahan di masyarakat. Selain itu, banyak berita-berita hoax di sosial media yang membuat ketakutan tersendiri bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka ditarik kesimpulan bahwa sumber daya dalam Sinergitas Pemerintah Daerah dan Satuan Militer dalam pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19 Di Kabupaten Sidoarjo sudah cukup tersedia. Organisasi pada beberapa satuan organisasi telah masuk anggota gugus tugas percepatan penanganan Covid-19. Dari segi keuangan sudah ada anggaran yang diperuntukkan bagi pemulihan ekonomi Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berusaha memberikan informasi terkait jumlah terdampak Covid-19. Selain melalui portal yang dikhususkan bagi pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Kodim 0816 berupaya membantu dalam memberikan sosialisasi dan penyuluhan terkait Covid-19. Karakteristik mitra dalam Sinergitas Pemerintah Daerah Dan Satuan Militer di Kabupaten Sidoarjo sudah cukup optimal. Keterlibatan antara pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Kodim 0816/Sidoarjo ditunjukkan pada Perbup Kabupaten Sidoarjo terkait penanganan Covid-19. Hubungan kemitraan dalam Sinergitas Pemerintah Daerah Dan Satuan Militer di Kabupaten Sidoarjo sudah cukup baik. Hal tersebut terlihat dari adanya kepercayaan kepada pemerintah Kabupaten Sidoarjo terutama dalam penanganan Covid-19 melalui acara vaksinasi yang sudah hampir mencapai seratus persen. Selain itu, ada sikap menghormati setiap anggota gugus tugas. Untuk konflik sendiri tidak ada yang terlalu signifikan. Karakteristik kemitraan dalam Sinergitas Pemerintah Daerah dan Satuan Militer di Kabupaten Sidoarjo sudah cukup baik. Dapat dilihat dari kepemimpinan ketua Satuan Tugas Percepatan Panggulangan Covid-19 mampu memberikan pencerahan terkait kegiatan. Penanganan Covid-19 dari faktor lingkungan dalam Sinergitas Pemerintah Daerah Dan Satuan Militer di Kabupaten Sidoarjo cukup kondusif. Akan tetapi hal yang cukup berpengaruh adalah adanya informasi-informasi yang bersifat Hoax dan mengganggu tingkat kepercayaan kepada pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

REFERENSI

- Afrizal, M.A, (2014). Metode Penelitian Kualitatif, Rajawali Pers.
Anwar, Anas Iswanto. (2020). Sinergitas Pusat-Daerah Untuk Penguatan Ekonomi Domestik. Bunga Rampai. Unhas

- Agustino, L. (2020). Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19 : Pengalaman Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(2), 253–270.
- Alfajri, A., Setiawan, A., & Wahyudi, H. (2019). Sinergitas Pembangunan Tata Ruang Pertahanan Daerah dalam Menghadapi Ancaman Non-Militer di Indonesia. *Jurnal Global & Strategis*, 13(1), 103. <https://doi.org/10.20473/jgs.13.1.2019.103-122>
- Fibriyanti, W., & Kurniasih, D. (2019). Building a Business Using E-commerce Technology. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 662(3). <https://doi.org/10.1088/1757-899X/662/3/032052>
- Jusriadi, A., Kamaluddin, L. A., & Aljurida, A. (2020). Manajemen Mitigasi Krisis Pangan di Era Pandemi Covid 19. *Journal of Governance and Local Politics*, 2(2), 216–227. <https://doi.org/10.47650/jglp.v2i2.96>
- Kodar, M. S., Rahmat, H. K., & Widana, I. D. K. K. (2020). Sinergitas Komando Resor Militer 043/Garuda Hitam dengan Pemerintah Provinsi Lampung dalam Penanggulangan Bencana Alam. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 437–447.
- Kurniasih, D. (2021). Penyusunan Laporan bagi para Pendamping UMKM di Jawa Barat. *Jurnal Pengabdian Dharma Wacana*, 2(2), 56–62. <https://e-jurnal.dharmawacana.ac.id/index.php/jp/article/view/211>
- Najiyati, S., & Susilo, S. R. T. (2011). Sinergitas Instansi Pemerintah Dalam Pembangunan Kota Terpadu Mandiri. *Jurnal Ketransmigrasian*, 28(2), 113–124.
- Nugroho, M. R. (2018). Penerapan Pola Sinergitas antara BUMDES dan UMKM. *Riset Ekonomi Pembangunan*, 01(01), 28–37.
- Rofiah, C., & Bungin, B. (2020). QUALITATIVE METHODS : SIMPLE RESEARCH WITH TRIANGULATION THEORY DESIGN. *Scholar.Archive.Org*, 2507(February), 1–9.
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2019). Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Sinergitas Akademisi Dan TNI Bersama Tangkal Hoax Dan Black Campaign. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 8–16. <https://doi.org/10.31960/caradde.v2i1.119>
- Susdarwono, E. T. (2020). Kebijakan Sinergitas R & D Pemerintah, Komunitas Epistemik, dan Sektor Swasta dalam Percepatan Kemandirian Industri Pertahanan. *Journal of Governance and Local Politics*, 2(2), 106–130. <https://doi.org/10.47650/jglp.v2i2.50>
- Priambodo, A., Widyaningrum, N., & Rahmat, H. K. (2020). Strategi Komando Resor Militer 043/ Garuda Hitam dalam Penanggulangan Bencana Alam di Provinsi Lampung. *PERSPEKTIF*, 9(2), 307-313.
- Syamsulhakim, E. (2020). Peran Bank Dunia Dalam Mendukung Penanganan Wabah Covid-19 di Indonesia. Presentasi disampaikan pada Webinar “Membangun Kerja Sama Pembangunan Internasional Dalam Penanganan COVID-19” Hari Rabu, Tanggal 6 Mei 2020.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI